

## **Konteks Misi Katolik**

### **Di Indonesia**

**F.X. Armada Riyanto**  
STFT Widya Sasana Malang  
Email : fxarmadacm@gmail.com

*Recieved: 28 Oktober 2022 Revised: 11 November 2022 Published: 12 Desember 2022*

#### **Abstract**

This article focuses on the milestones of mission in the Catholic Church. Using the historical-panoramic method, the author attempts to propose some important milestones that have been passed by the missionaries, as one of the tangible evidences of the spread of their faith, which was driven by Christ's mandate to proclaim the Gospel to all creation (Mark 16:15). This mandate was articulated in the work of the apostles. From the Acts of the Apostles, we know that there were several mission centers, where the Apostles prepared themselves with teaching and community building. Among them, the most obvious is Antioch. Paul was a product of missionaries who came from the Antioch "school". This spirit of mission was later continued by the Catholic Church until the birth of Propaganda Fide (1622). The founding of Propaganda Fide has various background connections. It should perhaps be noted that the year 1622 was one hundred years less than the Papal Bull, Decet Romanum, which condemned and excommunicated Martin Luther in 1521. This meant that Protestantism had already spread to many parts of Northern Europe. Not only that, Protestants had also begun to defeat and displace the colonial rule of Catholic kings in new territories, including India and Indonesia.

**Keywords:** Christ, Propaganda Fide, missionaries, Catholic mission.

#### **Abstrak**

Artikel ini berfokus pada tonggak-tonggak sejarah misi dalam Gereja Katolik. Dengan metode historis-panoramik, penulis berusaha untuk mengajukan beberapa tonggak penting yang telah dilalui oleh para misionaris, sebagai salah satu bukti nyata penyebaran iman mereka, yang didorong oleh amanat Kristus untuk mewartakan Injil ke segala makhluk (Markus 16:15). Amanat ini terartikulasi dalam karya para rasul. Dari Kisah Para Rasul, kita ketahui ada beberapa pusat misi, dimana para Rasul mempersiapkan diri dengan pengajaran



dan pembentukan komunitas. Diantaranya, yang paling jelas ialah Antiokhia. Paulus merupakan produk misionaris yang berasal dari “sekolah” Antiokhia. Semangat misi ini di kemudian hari diteruskan oleh Gereja Katolik hingga lahirlah Propaganda Fide (1622). Pendirian Propaganda Fide ini memiliki keterkaitan latar belakang cukup beragam. Yang barangkali harus dicatat bahwa tahun itu 1622 merupakan pasca-seratus tahun kurang satu dari Bulla Paus, *Decet Romanum*, yang menghukum dan mengekskomuniasi Martin Luther tahun 1521. Artinya, Protestantisme telah demikian menyebar ke banyak wilayah Eropa Utara. Tidak hanya itu, kaum Protestan juga telah mulai mengalahkan dan menggusur kekuasaan kolonial raja-raja Katolik di wilayah-wilayah baru, diantaranya di India dan Indonesia.

**Kata kunci:** Kristus, Propaganda Fide, misionaris, misi Katolik.

## 1. Pendahuluan

Pernahkah orang membayangkan bahwa dalam sejarah misi Gereja Katolik di Indonesia atau Hindia Belanda Timur (*Öost Nederlandsch Indië*), pada tahun 1605-1807 benar-benar tanpa imam misionaris satu pun? Meski sejarah misi “gelap” selama dua ratusan tahun, tetapi iman Katolik ternyata tidak padam sama sekali di satu dua tempat. Diantaranya di Larantuka, Flores, atau di Kepulauan Solor satu dua komunitas Katolik tetap bertahan dalam imannya yang mereka dapatkan dari para misionaris Portugis. Karya misi bukan pekerjaan manusia, tetapi Allah sendiri.

Berikut ini beberapa konteks misi yang menjadi “tonggak-tonggak” bagaimana misi Katolik dijalankan di tanah air. Umumnya “konteks” mengatakan suasana zaman, disamping peristiwa politik maupun teologis.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Resume Misi

#### 2.2.1 Kristus

“Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk” (Markus 16: 15). Perintah Kristus tentang misi jelas. Apa yang tidak disampaikan oleh Kristus tetapi itu merupakan konsekuensi nyata ialah *bagaimana* itu dilaksanakan. Sejarah misi langsung terkait dengan bagaimana perintah Kristus ini direalisasikan dalam berbagai konteks peradaban.

#### 2.2.2 Zaman Para Rasul

Para Rasul melaksanakan perintah Kristus. Dari Kisah Para Rasul, kita ketahui ada beberapa pusat misi, dimana para Rasul mempersiapkan diri dengan pengajaran dan pembentukan komunitas. Diantaranya, yang paling jelas ialah Antiokhia. Paulus merupakan produk misionaris yang berasal dari “sekolah” Antiokhia. Paulus dan Barnabas berkeliling ke banyak kota di Yunani, dan kemudian kembali lagi ke Antiokhia, pergi lagi dan akhirnya ditangkap,



dihukum mati, dan wafat sebagai martir di Roma, di luar tembok kota Roma, yang sekarang dikenal dengan Tre Fontane.

### **2.2.3 Gregorius Agung (540-604)**

Paus Gregorius adalah “pengutus” para misionaris yang membertobatkan bangsa-bangsa “Anglo Saxons” yang kafir ke Kekristenan. Paus Gregorius terkenal dengan sikap dan kata-katanya yang tegas, “Apabila ada di antara para misionaris yang takut, tidak perlu ragu untuk pulang saja.” Jadi, terkait dengan misiewartakan Injil, Paus sebagai Wakil Kristus-lah yang memiliki kewenangan. Dan, para misionaris yang mentobatkan bangsa-bangsa menjadi santo-santa hebat dalam Gereja Katolik. Santo Agustinus dari Canterbury, Inggris. Santo Bonifasius (yang membertobatkan bangsa Jerman), Santo Willibrordus (yangewartakan Injil ke bangsa-bangsa Belanda), Santo Sirilus dan Methodius (dua bersaudara) yang dikenal sebagai pewarta Injil ke bangsa-bangsa Slavia. Santo dari Irlandia: Patrisius, dan seterusnya. Mereka semua diutus oleh Paus. Benedictus, Domenicus, Fransiskus Asisi dan banyak santo-santa pada periode ini adalah pewarta-pewarta kebenaran Injil dengan berbagai kisah dan legendanya menampilkan kesetiaan yang luar biasa kepada Bapa Suci.

Gambaran ini melekat pada benak hati Santo Ignatius, tatkala para Romo yang tergabung dalam Serikat Yesuit berlutut di hadapan Paus dan mengucapkan sumpah janji setia untuk bersedia diutus kemana saja oleh Paus untukewartakan Injil. Santo Vincentius di abad ke-17 selalu menegaskan kehendak Allah apabila panggilan misi datang dari Bapa Suci.

### **2.2.4 Zaman “Penemuan Benua-Benua” dan Kolonialisme**

Sampai dengan seorang penjelajah dunia dari Italia, yang bernama Christoforo Colombo (1451-1506) atau sebelum ini dengan berbagai temuan dari para pelaut Portugal, Spanyol, Perancis yang disebut “dunia” ialah wilayah Eropa. Penemuan-penemuan terusan dan jalan-jalan lautan menuju ke wilayah-wilayah baru di dunia lain, Amerika, Afrika, dan Asia membuka mata Sri Paus untuk pula mengutus para misionaris ke dunia baru ini. Tetapi, bagaimana caranya?

Terhadap wilayah yang “ditemukan” oleh para pelaut dan perdagangan dari Kerajaan Portugal, Paus “menyerahkan” segala pengaturan terkait dengan pewartaan Injil kepada raja Portugal. Demikian pula terhadap wilayah yang dikuasai oleh para pelaut Spanyol, Paus “memberi kewenangan” bagaimana Injil diwartakan kepada bangsa-bangsa itu. Misi yang dijalankan dalam konteks “kewenangan Kerajaan ini” dalam bahasa Portugis disebut “Padroado” (atau Patronage dalam bahasa Inggris). Paus melakukan “penyerahan kewenangan” terkait dengan penginjilan ini melalui penerbitan Bulla atau Surat Apostolik yang dari zaman ke zaman diperbaharui dan direvisi atau bahkan dihidupkan kembali. Konteks inilah yang memungkinkan mengapa sampai pada zaman Santo Vincentius (abad ke-17), tatkala Serikat Yesuit dibekukan oleh Paus



Clemens XIV, Raja Perancis meminta Romo-Romo CM untuk menggantikan misi Yesuit di Cina dan di Lebanon atau tempat lain. Raja – sekali lagi – memiliki “kewenangan” terhadap bagaimana karya misi atau pewartaan Injil dijalankan di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Konteks ini pula yang memungkinkan misionaris agung, Santo Fransiskus Xaverius bisa menjelajah wilayah-wilayah Goa, Malaka, Ternate, Tidore, Jepang, dan seterusnya. Fransiskus ada di dalam kapal-kapal dagang Portugis.

Tentang misi dalam “Padroado” Portugis, Paus Eugenius IV-lah yang pertama kalinya dalam sejarah disebut menerbitkan Bulla yang menegaskan kewenangan terhadap kerajaan Portugis, yaitu Bulla *Romanus Pontifex* tahun 1436. Bulla ini lantas dibaharui oleh Paus Nicholas V kepada Raja Alfonso V dari Portugal tahun 1455. Terlepas dari perkara bahwa metodologi misi kini telah mendapatkan kejelasannya, sistem misi dalam “Padroado” Portugis benar-benar menjadi sejarah yang sangat kompleks dan kerap kali juga menimbulkan konflik yang berdarah-darah di dalam misi Gereja Katolik. Diantaranya, hal itu dipicu dengan tuntutan penguasa sipil kerajaan di dunia baru yang menyalahgunakan kekuasaannya, seperti umpamanya perdagangan manusia yang tidak bisa ditolerir oleh Injil. Berikutnya terjadi kolonialisme yang berkepanjangan yang dalam banyak hal justru bertentangan dengan maksud dari kebenaran dan kabar gembira dari Injil itu sendiri. Belum lagi perkara bahwa Bulla *Romanus Pontifex* juga memberi kewenangan kepada Raja Portugal bahkan apabila halnya terkait dengan perkara *ekskomunikasi* atau *suspensi* apabila terdapat pelanggaran. Bukan hanya itu, juga apabila terjadi penunjukkan Uskup. Raja Portugis atau Spanyol akan mengajukan nama-nama mereka atau nama-nama para calon Uskup harus lolos seleksi dari raja-raja tersebut. Pada zaman Santo Vincentius saja (abad ke-17, di Perancis terdapat “Dewan Hati Nurani” Kerajaan yang bertugas untuk mengusulkan nama-nama calon Uskup). “Tumpang tindih” kewenangan ini benar-benar membuat karya misi tidak selancar atau semulus atau setertib seperti yang dibayangkan.

Perlu diketahui, dalam sejarah pembekuan Serikat Yesuit, Paus Clemens XIV dan sebelum Paus Clemens XIII adalah pengetok palu berikutnya setelah Romo-Romo Yesuit terlebih dahulu ditolak oleh raja Portugis, Spanyol, maupun Perancis karena aktivitas-aktivitasnya yang dipandang menjadi rivalitas pemerintah sipil. Artinya, Paus sedikit banyak dalam sejarah seringkali juga “tidak bisa berkata lain” selain meneguhkan apa yang dilakukan oleh raja-raja yang telah diberi kewenangan tersebut.

Kelak, gambaran “kekacauan” kewenangan ini masih tersisa di Indonesia pada tahun 1845 dalam konflik kewenangan antara Uskup (Vikaris Apostolik) Batavia, Mgr. J. Grooff dengan penguasa kolonial, Gubernur Jenderal J.J. Rochussen. Konflik ini merupakan bukti “sis-sis” keruwetan terkait dengan hubungan antara Gereja dan Negara, di mana pada waktu itu Gubernur Jenderal



merasa masih memiliki kewenangan terhadap urusan Gereja Katolik, yang jelas-jelas ditentang oleh Uskup Mgr. J. Grooff.

Kembali kepada Bulla *Romanus Pontifex* (1455), yang menjadi “fondasi” dari “Padroado” misi Katolik dalam patronase kerajaan-kerajaan Portugis dan Spanyol. Berikut ini kutipan substansi isinya yang saya ambil dari Wikipedia:

The Roman pontiff, successor of the key-bearer of the heavenly kingdom and vicar of Jesus Christ, contemplating with a father's mind all the several climes of the world and the characteristics of all the nations dwelling in them and seeking and desiring the salvation of all, wholesomely ordains and disposes upon careful deliberation those things which he sees will be agreeable to the Divine Majesty and by which he may bring the sheep entrusted to him by God into the single divine fold, and may acquire for them the reward of eternal felicity, and obtain pardon for their souls. This we believe will more certainly come to pass, through the aid of the Lord, if we bestow suitable favors and special graces on those Catholic kings and princes, who, like athletes and intrepid champions of the Christian faith, as we know by the evidence of facts, not only restrain the savage excesses of the Saracens and of other infidels, enemies of the Christian name, but also for the defense and increase of the faith vanquish them and their kingdoms and habitations, though situated in the remotest parts unknown to us, and ... the said infante ... believing that he would best perform his duty to God in this matter, if by his effort and industry that sea might become navigable as far as to the Indians who are said to worship the name of Christ, and that thus he might be able to enter into relation with them, and to incite them to aid the Christians against the Saracens ... to conserve their right and possession, [the said king and infante] under certain most severe penalties then expressed, have prohibited and in general have ordained that none, unless with their sailors and ships and on payment of a certain tribute and with an express license previously obtained from the said king or infante, should presume to sail to the said provinces or to trade in their ports or to fish in the sea, ... since we had formerly by other letters of ours granted among other things free and ample faculty to the aforesaid King Alfonso – to invade, search out, capture, vanquish, and subdue all Saracens and pagans whatsoever, and other enemies of Christ wheresoever placed, and the kingdoms, dukedoms, principalities, dominions, possessions, and all movable and immovable goods whatsoever held and possessed by them and to reduce their persons to perpetual slavery, and to apply and appropriate to himself and his successors the kingdoms, dukedoms, counties, principalities, dominions, possessions, and goods, and to convert them to his and their use and profit – by having secured the said faculty, the said King Alfonso, or, by his authority, the aforesaid infante, justly and lawfully has acquired and possessed, and doth possess, these islands, lands, harbors, and seas, and they do of right belong and pertain to the said King Alfonso and his successors, nor without special license from King Alfonso and his successors themselves has any other even of the faithful of Christ been entitled hitherto, nor is he by any means now entitled lawfully to meddle therewith.

*Romanus Pontifex* memberi kewenangan hampir “menyeluruh” kepada Raja Alfonso V terkait dengan aktivitas misi Gereja Katolik di wilayahnya. “Menyeluruh” ini meliputi: kewenangan untuk membangun Gereja, biara,



mengatur administrasi Gereja terkait dengan berbagai Ordo, dan bahkan memilih dan mengutus para misionarisnya yang akan bertugas melakukan pewartaan Injil dan bahkan juga nama-nama para pemimpinnya, para Uskupnya, dan segala hal terkait dengan aktivitas misi dijalankan. Dengan kata lain, apabila kewenangan raja yang didelegasikan kepada penguasa sipil setempat menolak atau menghukum para misionaris yang menentang atau menghalangi aktivitas pemerintahan kolonial, halnya berlaku demikian (Camps 2000).

Bulla-Bulla Paus yang berkaitan dengan *Romanus Pontifex* (1455), diantaranya ialah *Inter Caetera* (1493) yang digunakan untuk memberi kewenangan kepada Portugal dalam berbagai wilayah penaklukan. Perkara misi “Padroado” ini kelak akan memasuki babak yang kompleks dalam munculnya berbagai persaingan dari raja-raja Katolik di wilayah-wilayah Afrika, India, Cina, dan Amerika Latin.

### 2.2.5 Propaganda Fide 1622

Pendirian Propaganda Fide 1622 memiliki keterkaitan latar belakang cukup beragam. Yang barangkali harus dicatat bahwa tahun itu 1622 merupakan pasca-seratus tahun kurang satu dari Bulla Paus, *Decet Romanum*, yang menghukum dan mengekskomuniasi Martin Luther tahun 1521. Artinya, Protestantisme telah demikian menyebar ke banyak wilayah Eropa Utara. Tidak hanya itu, kaum Protestan juga telah mulai mengalahkan dan menggusur kekuasaan kolonial raja-raja Katolik di wilayah-wilayah baru, diantaranya di India dan Indonesia. Pertanyaan baru sudah barang tentu terkait langsung dengan bagaimana keadaan misi Gereja Katolik di wilayah-wilayah yang tidak lagi ada dalam kekuasaan raja-raja Katolik (Prabhu 2005; Alberts 2012).

Adalah Paus Gregorius XV, seorang Kardinal Alessandro Ludovisi yang sudah tua dan *de facto* dua tahun berikutnya wafat, menerbitkan Bulla *Inscrutabili Divinae Providentiae Arcano* tahun 1622, sebuah Bulla pendirian Kongregasi Propaganda Fide yang akan menjadi sebuah departemen yang sangat *powerful* dalam Gereja Katolik terkait dengan misi ke seluruh dunia. Pendirian Kongregasi Propaganda Fide ini kelak akan menjadi emblem betapa Tahta Suci Vatikan kembali dapat merevitalisasi otoritasnya atas tanah-tanah misi di planet ini.

*Pasca-pendirian Kongregasi Propaganda Fide tahun 1622:*

- Pada tahun 1627, Paus Urbanus VIII mendirikan *Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide*, yang kelak akan menjadi Universitas Urbaniana, di mana pada awalnya menjadi tempat penggemblengan para misionaris yang akan dikirim oleh Propaganda Fide.
- Propaganda Fide banyak mengutus pada mulanya MEP (Mission Etranger de Paris), kongregasi yang membaktikan diri untuk karya misionaris. Disamping itu juga beberapa tarekat dan kongregasi lain. Misi pertama para imam Kongregasi Misi (CM) ke Cina tahun 1697,



yaitu Romo Ludovico Appiani dan Romo Johannes Müllener terjadi karena keputusan Propaganda Fide.

Nama “Kongregasi Propaganda Fide” (Penyebaran Iman) berubah pada tahun 1967 menjadi “Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa” oleh Paus Paulus VI. Dan, pada tanggal 5 Juni 2022, Kongregasi ini digabung menjadi satu dengan “Pontifical Council for Promoting the New Evangelization” ke Dicasteria Evangelization. Saat ini, Prefect-nya Kardinal Luis Antonio Tagle.

*The Congregation for the Evangelization of Peoples or "De Propaganda Fide" in current affairs: Currently the territories dependent on the Congregation, called by the reform of the Curia made by Pope Paul VI Congregation for the Evangelization of Peoples or "De Propaganda Fide" and by the Apostolic Constitution Pastor Bonus of John Paul II simply Congregation for the Evangelization of Peoples, include some regions of South East Europe and America, almost all of Africa, the Far East and Oceania, with the exception of Australia and most of the Philippine Islands.*

*The duty of the Congregation is to direct and coordinate worldwide the work of evangelization of peoples and missionary cooperation. In addition, the Dicastery has direct and exclusive jurisdiction over its territories, with the exception of what concerns other Dicasteries of the Roman Curia.*

*The Congregation builds and divides in its territories missionary districts according to the needs; presides over the government of the missions; it examines the issues and the reports sent by the Ordinary, and Nuncios and by the Episcopal Conferences; monitors the Christian life of the faithful, the discipline of the clergy, charities and Catholic Action; supervises the Catholic schools and seminaries.*

## **2.2 Resume Misi Katolik Indonesia**

Bagaimana mungkin tanpa misionaris selama dua ratus tahun (1605-1807)? Sejak kedatangan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) Belanda atau perkumpulan dagang Kerajaan Belanda yang berdiri tahun 1602, semua imam Katolik (Portugis) diusir dari Indonesia, orang-orang Katolik diregistrasi sebagai Kristen Protestan, gereja-gereja Katolik yang ada disegel atau diubah menjadi gereja Protestan, komunitas-komunitas Katolik di kepulauan Ambon dan sekitarnya dibekukan. Komunitas Katolik di Ambon bahkan dijadikan Kristen Protestan. Benteng Portugis, *Nossa Senhora Anunciada* (Bunda Maria dari Kabar Sukacita), yang didirikan tahun 1515 direbut oleh Belanda tahun 1605 (semua kekuasaan Portugis berpindah tangan ke Belanda), dan berganti nama menjadi *Nieuw Victoria* (saat ini terletak di bagian belakang dari markas Angkatan Bersenjata, yang dahulu memang menjadi benteng pertahanan Portugis). Sepertinya menjadi sebuah momen simbolis misi Katolik Portugis ketika itu, bahwa seiring dengan jatuhnya benteng *Nossa Senhora Anunciada* berhenti pula karya misi Katolik di Indonesia (Alberts 2012).



Tetapi, apakah api iman Katolik padam? Tidak. Secara sembunyi-sembunyi beberapa komunitas Katolik di Flores melakukan doa dan peribadatan, dan dengan demikian melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap kebijakan politis VOC. Dalam reportase historis, terdapat lebih dari 30 siswa seminari calon pastor Katolik di Lohayon, Benteng Portugis, Solor Timur dibunuh oleh pasukan Islam yang didukung oleh VOC. Dapatkah kita membayangkan betapa gigih komunitas-komunitas Katolik di Flores tetap setia pada imannya meski tanpa pelayanan Ekaristi selama dua ratus tahun (Alberts 2012; von Faber 1931; de Souza 2005; Muskens 1974)!

VOC bukan hanya kumpulan para pedagang yang merepresentasi kekuasaan Kerajaan Belanda di Asia, melainkan juga melakukan “perang agama”, seperti terjadi di Eropa (di Eropa Protestan melawan Katolik dan sebaliknya). VOC selama keberadaannya di Indonesia melakukan penindasan terhadap komunitas Katolik selama dua ratus tahun (1605-1799).

Tetapi pada akhir abad ke 17, VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi dan bubar. Kerajaan Belanda menunjuk Gubernur Jenderal sebagai representasi kekuasaannya. Tetapi, di penghujung tahun 1800 atau sebelumnya, Belanda dikalahkan oleh Napoleon (Perancis). Napoleon selama beberapa waktu lantas menjadi “kaisar” Belanda juga. Pada saat itulah Hukum diskriminatif terhadap agama lain di luar Kristen Protestan yang kerap dilancarkan oleh penguasa Belanda (dan termasuk di wilayah Hindia Belanda oleh VOC) dihentikan. Maka, Gubernur Jenderal yang pertama, Herman Daendels, mulai memersilakan pintu-pintu gereja Katolik dibuka kembali. Dan, tibalah dua imam Katolik dari Belanda yang juga ketika itu dikirim oleh Kerajaan Belanda 1807. Tujuan dari para misionaris Katolik pertama pada waktu itu ialah untuk melayani bidang kerohanian Katolik pasukan Kerajaan Belanda yang bertugas di Indonesia (van der Velden 1908; Hensen 1908; van Winsen 1970).

*Misi Katolik dan Propaganda Fide.* Kongregasi Suci *Propaganda Fide* (yang berdiri tahun 1622) mengambil peranan dalam misi Katolik di Indonesia sejak 1807, dimana wilayah misi di Indonesia (ketika itu disebut “Nederlandsch-Indië”) untuk pertama kalinya menjadi Prefektur Apostolik. Dan, pada tahun 1841 Prefektur Apostolik Batavia, Indonesia, ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Batavia.

Tetapi, *Propaganda Fide* tidak mengirim misionaris seperti yang terjadi dalam sejarah misi di tempat lain, seperti China atau Vietnam. Para misionaris yang bekerja di Indonesia sebelum tahun-tahun 1605 berasal dari Portugis dan Spanyol yang datang ke Indonesia dalam *Padroado Portugis*. Selama dua ratus tahun berikutnya (1605-1807) Indonesia berada dalam kekuasaan VOC yang merepresi secara menyeluruh aktivitas Gereja Katolik. Tidak ada satu pun misionaris bekerja di Indonesia. Setelah VOC bubar, kebebasan agama Katolik mulai direvitalisasi. Sejak momen itulah, *Propaganda Fide* mengambil peranan



penting dalam sejarah misi Indonesia (Visser 1925; Muskens 1974; Vriens SJ 1972; de Souza 2005; Prabhu 2005).

Dalam konflik “besar” antara pemimpin Gereja Katolik Batavia, Mgr. J. Grooff dengan Gubernur Jenderal, J.J. Rochussen, intervensi menentukan dijalankan oleh Nuncius untuk Kerajaan Belanda, Ferrieri. Negosiasi dijalankan karena Gubernur Jenderal “mengusir” Mgr. J. Grooff dengan semua imam pembantunya keluar dari Indonesia. Akibatnya, selama satu tahun atau lebih, Indonesia tidak memiliki imam misionaris satu pun.

Situasi yang tidak menguntungkan karya misi Katolik tersebut, akhirnya dapat “dipecahkan” dalam perundingan yang menghasilkan dokumen yang disebut *Nota van Punten*. *Nota van Punten* (1948) adalah perjanjian antara Tahta Suci Vatikan dengan Pemerintah Belanda terkait dengan peristiwa konflik Mgr. Grooff dan Gubernur Jenderal, J.J. Rochussen. Ditegaskan bahwa dalam *Nota der Punten* otonomi kewenangan pimpinan Gereja (Vikaris Batavia) diakui oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah “negosiasi rekonsiliatif”, misi Gereja Katolik kembali dijalankan dan mendapat suatu pelayanan yang mengesankan dengan kehadiran Romo-Romo Yesuit atas undangan Mgr. Vrancken di tahun 1859.

*Nadere Regeling* (1913) yang merupakan perjanjian antara Vatikan dengan Pemerintah Hindia Belanda (Menteri Koloni di Den Haag) yang mengatakan bahwa “perluasan” wilayah Gerejawi di luar Vikariat Jakarta (dengan demikian di luar wilayah kerja Yesuit) oleh Vatikan sebagai wilayah gerejani masing-masing yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Produknya: Prefekturat Sumatra dan Prefekturat Sunda Kecil (MUSKENS 2: 77). “Pengakuan” pemerintah kolonial ini penting terkait dengan UUD Belanda tahun 1948 dan *Nota der Punten* (1947) serta *Regerings-Reglement 1954 Pasal 123* yang menegaskan bahwa aktivitas misi keagamaan harus berada dalam izin dan pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda.

*Propaganda Fide* kembali mengambil peranan penting setelah mengundang beberapa kongregasi religius untuk datang membantu misi di Indonesia. Utamanya, ketika Prefek *Propaganda Fide*, Cardinal Willem van Rossum, C.S.S.R (1923). Dukungan *Propaganda Fide* lantas banyak diterjemahkan dalam beberapa pengembangan Gereja Katolik Indonesia dan dukungan finansial terkait dengan pendidikan klerus atau ongoing formation mereka.

### **2.2.1 Misi Katolik Portugis dan Misi Katolik Belanda**

Karya misi Katolik (dari para misionaris Belanda) yang datang di awal abad ke-19 (tepatnya tahun 1808) *berbeda* dengan karya misi yang dikerjakan oleh para misionaris Portugis di era seribu lima ratusan di zaman Franciskus Xaverius. Dimana bedanya?

Perbedaan paling menyolok ditampilkan dengan personil. Di tahun sebelum 1600 jelas para misionaris Katolik berasal dari Portugis atau Spanyol (Keduanya



Kerajaan Katolik). Sementara setelah tahun 1800 misionaris Katolik yang bekerja berasal dari Belanda (Kerajaan Protestan). Bagaimana memahami ini? Pada abad ke-16, Ambon, Maluku, Indonesia pernah disinggahi oleh Santo Fransiskus Xaverius (1546/1547). Tetapi, sebelum itu, sejak tahun 1509 (tahun kedatangan kapal-kapal Portugis) satu dua misionaris telah mulaiewartakan Injil di Indonesia. Dan, pada tahun 1515, fortifikasi Portugis *la Nossa Senhora Anunciada* di Ambon didirikan. Ini berarti, misionaris datang ke Indonesia karena *Padroado Portugis*, yang serupa dan menjadi “kelanjutan” dari Goa dan Malaka. Misi *Padroado Portugis* selesai ketika kapal-kapal VOC Belanda mengalahkan fortifikasi Portugis mulai tahun 1605 di Ambon dan sekitarnya. Penganiayaan dan surpresi terhadap misi Katolik terjadi, seiring pula “kerjasama” VOC dengan kerajaan-kerajaan Muslim yang ada. Misi Katolik “digantikan” oleh Protestant Zending. Banyak Gereja Katolik “diubah” menjadi Gereja Protestan. Orang-orang Katolik yang ada diregistrasi sebagai orang-orang Protestan. Para imam Katolik dari Portugis dan Spanyol tidak lagi diperbolehkan masuk danewartakan Injil. Sebaliknya, para pendeta Protestan dari Belanda “memanfaatkan” situasi dan difasilitasi oleh VOC (B.J.J. Visser, *Onder Portugees-Spaanse vlag. De Katholieke Missie van Indonesië 1511-1601*, Amsterdam 1925; G.A.C. van Winsen, *Rooms-katholieke missie in Indonesië*, dans Grote Winkler Prins, Amsterdam-Brussel 1970, t. 10, 13-15; Cf. van Winsen CM). VOC pada waktu itu bukan hanya perkumpulan dagang Belanda, melainkan juga menjadi representasi Kerajaan Belanda (yang Protestan). Situasi politik yang “merugikan” misi Katolik ini akan terus berlangsung bahkan hingga setelah VOC bubar di tahun 1798.

Perubahan politik di Kerajaan Belanda dan Eropa mengalir pula ke Indonesia. Di Belanda, pada tanggal 16 Mei 1795 Republik Kesatuan Tujuh Provinsi yang berdiri mulai tahun 1588 dibubarkan, karena “Revolusi Batavia” tahun 1795 dan Belanda berubah menjadi “the Batavian Republic” (1795-1806). Pada tahun 1806-1810, Belanda menjadi “the Napoleonic Kingdom of Holland”, sebab dikalahkan oleh Perancis.

Dibawah Raja Louis-Napoleon (1806-1810) kekuasaan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) berada dalam kewenangan menteri kolonial (Konstitusi 1806). Indonesia tidak lagi di bawah kongsi dagang, semacam VOC di masa lampau, melainkan berada dalam kewenangan pimpinan Gubernur Jenderal, yang akan bertindak atas nama Kerajaan Belanda. Sementara itu, Gereja Reformis Calvinis kehilangan posisi privilese nya melalui dekrit tanggal 5 Agustus 1796. Situasi ini menyebabkan di wilayah yang menjadi koloni Belanda dideklarasikan pula “kebebasan beragama” melalui instruksi yang disampaikan oleh Gubernur Jenderal, utamanya yang terjadi di Hindia Belanda, melalui promulgasi kerajaan tertanggal 9 Februari 1807, article 22 dan 23. Dengan demikian, ketentuan yang diberlakukan di “Union of Utrecht” sejak tanggal 20 January 1579 yang menegaskan satu agama (Calvinism) dan menyebabkan



penindasan terhadap agama Katolik, telah berakhir. Kebebasan agama yang berhembus di Belanda mengalir pula di Hindia Belanda, Indonesia, sebagai wilayah jajahan.

Gubernur Jenderal pertama yang ditunjuk tanggal 28 Januari 1807 untuk Hindia Belanda (Indonesia) ialah Herman Willem Daendels, yang setelah mengalami perjalanan laut yang sulit tiba di Indonesia tanggal 1 Januari 1808. Pada waktu Daendels-lah, pintu gereja-gereja Katolik yang telah lama dibekukan selama dua ratus tahun, kini bisa dibuka kembali. Dan, komunitas-komunitas Katolik kembali dihidupkan lagi.

Sementara itu, melalui dekret 4 Maret tahun 1807, dua imam Projo Belanda, J. Nelissen dan L. Prinsen dapat pergi untuk pertama kalinya ke Indonesia sebagai misionaris (A.H.L. Hensen, *Het onstaan van de Rooms-Katholieke Missie in Nederlands-Indië*, De Katholiek, 133, 1908, pp. 274-295; Cf. van Winsen CM). Dekret 4 Maret 1807 disebut “Lodewijk-Nederlands dekret”, yang dari namanya “Lodewijk” atau “Louis” sudah menunjukkan bahwa Belanda waktu itu ada di dalam kekuasaan Perancis; Napoleon menjadi semacam “kaisar” bagi Belanda. Tetapi, terkait langsung dengan dekret ini ialah bahwa para misionaris tersebut dipandang oleh pemerintah sebagai “fungsionaris pemerintah kolonial”, yang karenanya mereka mendapatkan pula gaji dan tunjangan seperti para pendeta Protestan umumnya. Mereka disebut “fungsionaris pemerintah kolonial” oleh pemerintah, karena kedatangan mereka dengan dekret Kerajaan yang dimaksudkan untuk melayani iman orang-orang Belanda Katolik, utamanya para tentara yang bertugas di Indonesia. Tetapi, sisi yang lain ialah bahwa para misionaris dapat diganti atau dipindahkan oleh Gubernur Jenderal seturut **kepentingan negara**. “Kondisi” misi Katolik yang tidak bebas dan leluasa ini disebut dalam ungkapan bahasa Latin, agama “*est quasi serva, in vinculis gubernii constricta*” (hampir seperti budak di lingkaran batasan pemerintah) yang kelak akan mendapat warna baru setelah konflik Mgr. J. Grooff dengan J.J. Rochussen (1845). Sesudah konflik yang kelak akan disebut sebagai “Grooff Affair” tersebut, hubungan Gereja Katolik (misi Katolik) dengan pemerintah kolonial Belanda akan mendapat persepektif baru (J.J. Kleintjes, *Mgr. Grooff, Apostolisch Vicaris van Batavia*, Bijdragen Bisdom Haarlem, 47, 1931, p. 399; Cf. van Winsen CM).

Pada tanggal 8 Mei 1807 dibentuklah Prefektur Apostolik Batavia, dengan Prefek Apostolik pertama J. Nelissen. Dengan demikian wilayah misi Indonesia untuk pertama kalinya terpisah dari Prefektur Apostolik Kepulauan Samudera Hindia. Dan, pada tanggal 3 April 1841, Prefek Apostolik Batavia menjadi Vikariat Apostolik Batavia dengan Mgr. J. Grooff sebagai Vikaris Apostolik pertama, yang kelak akan berperkara dengan Gubernur Jenderal J.J. Rochussen terkait dengan independensi kewenangan Gereja Katolik di hadapan pemerintahan kolonial. Di sinilah peran penting dari Propaganda Fide dalam misi di Indonesia. Tetapi, karena Indonesia (Hindia Belanda) ada dalam



kekuasaan kerajaan Kristen Protestan, setiap produk persetujuan dari Propaganda Fide selalu melalui Kerajaan Belanda. Secara kebetulan, Prefek Propaganda Fide di tahun 1918-1932 ialah seorang Belanda, yaitu Kardinal Willem Marinus van Rossum, CSSR, yang akan turut berperan penting pada karya misi di Indonesia dengan mengirim banyak kongregasi dan tarekat religius berkarya di tanah air. *Apostolic Delegates* untuk Indonesia: Georges-Marie de Jonghe d'Ardoye (6 July 1947 – 2 March 1955).

Baik misionaris Katolik Portugis maupun Katolik Belanda, keduanya datang dengan menumpang kapal-kapal dagang. Artinya, mereka berada di sekitar para “penguasa perdagangan”. Kelompok dagang tersebut biasanya memiliki para militer sekaligus menancapkan kekuasaan di wilayah tersebut (tidak hanya berdagang). Mereka lantas menjadi semacam perpanjangan tangan yang merepresentasikan kekuasaan kerajaan negaranya. Pada saatnya mereka kemudian “menjajah” Hindia Belanda. Para misionaris Portugis lebih memiliki keleluasaan untuk berkarya,ewartakan Injil kepada para penduduk asli, daripada para misionaris Belanda. Para misionaris Katolik Portugis di Indonesia tidak memiliki “ikatan” dengan penguasa perdagangan setempat. Sebaliknya, para misionaris Katolik Belanda yang datang ke Hindia Belanda Timur (Indonesia) sesudah tahun 1800, “terikat” atau “diikat” oleh penguasa pemerintahan kolonial. Artinya, para misionaris Belanda tunduk pada penguasa politik kolonial dalam hal pewartaan Injil dengan segala restriksi penyebarannya yang ditegaskan sesuai kepentingan pemerintah Belanda.

Mengapa para misionaris Katolik dari Belanda tunduk pada penguasa sipil kolonial? Alasannya, misionaris-misionaris itu dikirim, pergi ke daerah dan kepada siapa mereka bisa melakukan evangelisasi, serta kapan tugas mereka selesai dan pulang, semuanya atas pengaturan penguasa pemerintah kolonial dan atas biaya negara. Beberapa imam yang dikirim kebanyakan Diosesan, sampai pada suatu ketika Mgr. Vrancken, setelah peristiwa “Grooff Affair” akan meminta Provinsial Yesuit untuk misi ke Hindia Belanda dan mereka tiba di Surabaya tahun 1859.

### **2.2.2 Misi Katolik Setelah “Peristiwa Konflik Mgr. J. Grooff dengan Gubernur Jenderal J.J. Rochussen” Tahun 1845**

Salah satu peristiwa penting yang turut mengubah strategi misi Katolik ialah apa yang terjadi di tahun 1845. Umumnya tidak banyak para penggiat sejarah misi yang memerhatikan peristiwa tersebut. Begitu pentingnya peristiwa itu, hingga menurut Karel Steenbrink telah ribuan halaman ditulis untuk menjelaskan, menguraikan alasan, sebab-sebab dan konsekuensinya untuk karya misi selanjutnya di Hindia Belanda dari berbagai sudut pandang mengenai peristiwa konflik hebat antara Mgr. Jacobus Grooff dan Gubernur Jenderal, Jan



Jacob Rochussen tersebut.<sup>1</sup> Konflik itu sering disebut dengan “Affair Grooff” (Kleintjes 1931; van der Velden 1908; Hensen 1908; van Winsen 1970).

Mgr. J. Grooff adalah Vikaris Apostolik pertama Batavia (1842-1846). Rochussen adalah Gubernur Jenderal yang merepresentasi kekuasaan politik pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia (1845-1851). Bahwa keduanya masuk dalam konflik, halnya langsung berkaitan dengan peristiwa sejarah “konflik besar”, karena terjadi pada kedua pemimpin, yang satu pemimpin Gereja dan yang lain pemimpin kekuasaan politik. Halnya masuk dalam ranah konflik Gereja dan negara (di Hindia Belanda). Dari sendirinya, *the aftermath* dari konflik tersebut akan berkaitan langsung dengan perkara bagaimana hubungan antara Gereja dan negara didefinisikan, diatur, diterapkan; atau bagaimana karya misi Katolik akan dilakukan terkait dengan hukum negara pemerintah kolonial.

Bagaimana konflik itu terjadi? Mgr. Grooff diangkat menjadi Vikaris Apostolik pertama di Batavia. Dekritnya dikeluarkan oleh Propaganda Fide 20 September 1842; lalu ditegaskan oleh dekrit Kerajaan Belanda tanggal 16 Desember 1842. Pada saat diangkat sebagai Vikaris Apostolik, Mgr Grooff bertugas di Suriname atau Hindia Belanda Barat. Jacobus lahir tahun 1800, ditahbiskan imam usia dua puluh lima tahun; dan di usia yang belia (27 tahun) dia ditunjuk sebagai Prefek Apostolik di Suriname. Dia dikenal sebagai seorang pribadi yang tegas dan baik serta cerdas. Di Suriname pernah dia menjadi satu-satunya imam Katolik di sana. Di jelang akhir tugasnya dia bekerja di lingkungan penderita kusta. Karena tugasnya itu, dia tidak segera meninggalkan Suriname untuk pergi ke Hindia Belanda. Dia baru kembali ke Belanda dan ditahbiskan Uskup sebagai Vikaris Apostolik di Leiden 26 Februari 1844, dan baru berangkat ke Hindia Belanda akhir 1844 serta tiba di Batavia tahun 1845 tanggal 1 April. Grooff dikenal sebagai seorang yang memiliki ketegasan dalam ortodoksi ajaran Gereja Katolik.

Begitu tiba di Batavia, oh iya dia tiba dengan membawa serta bersamanya empat imam yang akan menjadi rekan kerja di tanah misi, Mgr. Grooff langsung melihat “ketidakberesan” yang terjadi pada para imam yang ada di Vikariat, diantaranya adalah Pastor-pastor Hubertus Jacobus Cartenstat, Arnoldus Grube, dan Joannes Antonius van Dijk. Pastor Cartenstat adalah wakil dari Prefek Apostolik Mgr. Scholten (bertugas di Batavia), Pastor Grube bertugas di Semarang, dan Pastor van Dijk (dari Surabaya, tetapi ada juga pastor Adrianus Thijssen, yang mendapat banyak keluhan dari koleganya [pastor Godthardt] dan umat Katolik di Surabaya). Mereka semua itu lantas dijatuhi suspensi oleh Mgr. Grooff pada tahun 1845 (10 September). Suspensi berarti pembekuan kuasa imamat dari efektivitas karya pastoralnya di suatu wilayah Gerejani (Batavia).

---

<sup>1</sup> Karel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808-1942: Suatu Pemulihan yang Bersahaja 1808-1903* (terj.), 41.



Karena suspensi, secara konkret para imam itu tidak bisa menjalankan fungsi imamatnya di Hindia Belanda. Pastor Thijssen dari Surabaya langsung pulang ke Belanda tahun 1845.

Suspensi dijatuhkan biasanya atas berbagai alasan yang dipandang serius. Pada waktu itu, salah satu alasan serius ialah keterkaitan para imam dengan kelompok Freemason, entah itu berupa pergaulan atau keterlibatan dalam hal-hal serius seperti ritualnya atau dicurigai menjadi simpatisannya. Freemason merupakan “confraternity” (persaudaraan) yang berasal dari Abad Pertengahan dan yang menjunjung tinggi konsep etikanya sendiri serta memiliki kepercayaan “naturalistic deistic”. Umumnya, anggota Freemason adalah kelompok elit dari *societas* yang pada gilirannya bertentangan dengan Gereja Katolik. Gereja Katolik sendiri berdasarkan *In eminenti apostolatus* (1738) dari Paus Clement XII telah memandang Freemason dengan ajaran-ajarannya bertentangan dengan iman Katolik. Kelak Paus Leo XIII dalam *Ab apostolici* (1890) dan ajaran Konsili Vatikan I akan menegaskan bahwa umat Katolik yang tergabung dalam organisasi Freemason secara otomatis akan terkena “ekskomunikasi”.

Vikaris Apostolik pertama Batavia mencium praktek-praktek yang tidak sepatasnya dari para imam di Vikariatnya dan menjatuhkan suspensi kepada mereka 10 September 1845. Sementara itu tanggal 30 September di tahun yang sama, seorang Gubernur Jenderal yang baru, J.J. Rochussen tiba di Batavia. Dia mendengar “pembekuan” para imam Katolik (Surabaya, Semarang, dan Batavia) tersebut. Serta merta, Rochussen mengambil kebijakan bahwa *hanya* pastor-pastor yang telah mendapatkan izin dari Penguasa kolonial dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Hindia Belanda. Dari sendirinya, di sini perkaranya bukan hanya terdapat silang pandangan di antara penguasa Gereja dan penguasa negara, melainkan konflik frontal yang akan mengubah tatanan relasi keduanya.

Tanggal 19 Januari 1846 Mgr. Grooff dipanggil oleh Gubernur Jenderal untuk merundingkan pembatalan suspensi tersebut. Menurut Jacob Rochussen, *hanya* Pemerintah yang bisa memecat atau memindah tugaskan para imam Katolik. Sebab, keyakinan Rochussen, yang Protestan itu, Para pastor Katolik diutus ke Hindia Belanda oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan biaya negara. Vikaris Apostolik tidak bisa memecat para imamnya yang sudah mengantongi izin dari pemerintah Kolonial untuk memberikan pelayanan Pastoral. Sementara itu, Mgr. Grooff dengan tegas dan jelas mengatakan posisinya. Ranah wilayah Kevikarian (wilayah Gerejani) adalah kewenangannya. Adalah tugasnya untuk mendisiplinkan para imamnya. Dan, wilayah kegerajaan ini tidak bisa dicampuri oleh kekuasaan apa pun, termasuk kekuasaan politis. Mgr. Grooff tidak mau membatalkan suspensinya.

J. Rochussen bersiteguh pada pandangannya, bahwa dia memiliki segala kewenangan di wilayahnya. Sang Gubernur Jenderal marah. Segera sesudah itu, Mgr. Grooff diminta untuk meninggalkan Hindia Belanda dalam waktu 14 hari (Cf. Karel Steenbrink, p. 39) berserta keempat imam muda yang datang



bersamanya. Alasannya keempat imam muda itu pun belum mengantongi izin dari Kerajaan Belanda. Padahalnya, izin itu telah diberikan dan ditandatangani 12 Desember 1845.

Di tahun 1947 Seluruh Pulau Jawa (atau juga seluruh Hindia Belanda) tanpa imam misionaris. Sebab imam-imam yang ada telah dipecat oleh Mgr. Grooff dan semuanya telah kembali ke Belanda, sementara imam-imam muda yang baru tiba bersamanya tidak mendapat restu bekerja oleh Gubernur Jenderal. Konflik itu mengakibatkan “kekosongan misionaris” di seluruh Jawa selama beberapa tahun (sekitar dua tahun). Gereja Santa Maria, Gereja Katolik pertama, di Surabaya pun disegel oleh pemerintah. Tidak ada seorang pun atau kekuasaan apa pun yang bisa mendamaikan situasi ini di Hindia Belanda. Dan, tentu saja, Gereja-gereja Katolik tidak lagi bisa menjalankan Ekaristi.

Kepulangan Mgr. Grooff ke Belanda – oleh sebagian besar umat Katolik dipandang bukan sebagai “kekalahan” Gereja dari negara. Mgr. Grooff disambut bak pahlawan yang membela kemandirian dan otoritas Gereja Katolik berhadapan dengan otoritas politik (pemerintah kolonial). Tetapi sebagian klerus memandang Mgr. Grooff dianggap kurang bijaksana karena tidak bisa menegosiasikan dengan baik permasalahannya. Menurut Karel Steenbrink, “Affair Grooff” (Perkara Grooff) ini telah menjadi subjek utama dalam penelitian sejarah Gereja di tanah kolonial dan telah ribuan halaman ditulis mengenai relasi Gereja dan negara.

Rupanya berita konflik Mgr. Grooff dan Gubernur Jenderal ini menggelisahkan Vatikan. Halnya tentu yang paling dirugikan ialah karya misi. Lewat duta besarnya, Mgr. Ferreiri, Vatikan mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Kerajaan Belanda mengenai karya misi Katolik di Indonesia. Kesepakatannya antara lain, para klerus bila bekerja ke Hindia Belanda akan dibekali dengan surat izin khusus (surat ini akan disebut Surat Radicaal); Perihal ke tempat mana mereka akan ditugaskan menjadi kewenangan dari Pemimpin Gerejani, halnya akan diberitahukan kepada Gubernur Jenderal untuk menghindari konflik misi dengan zending Protestan; Gubernur Jenderal tidak akan ikut campur terhadap urusan kewenangan Gerejani; Pemimpin gerejani memiliki hak penuh untuk memberi suspensi kepada para imamnya tanpa campur tangan pemimpin pemerintah kolonial; Administrasi keuangan gerejani berada di tangan pemimpin Gereja yang mesti dilaporkan ke dewan Gereja, ke departemen keuangan pemerintah di Hindia Belanda guna pemeriksaan tahunan; Pemimpin religius diperbolehkan mengirim sebanyak mungkin misionaris menurut kebutuhan dengan biaya dari mereka sendiri; Pemimpin Gereja berhak mengunjungi wilayah Gerejaninya atas biaya negara dengan tetap memerhatikan prosedur keamanan yang menjadi tanggung jawab Gubernur Jenderal; jika kunjungan dijalankan atas biaya sendiri pun, halnya harus dikomunikasikan; dan seterusnya (van der Velden, *De Rooms-katholieke missie in Nederlandsch*



*Oost-Indië 1808-1908*, Nijmegen: Malmberg, 1908: 126-127; Karl Steenbrink I, 39-40; van Winsen CM).

Kesepakatan itu kelak akan memuncak dalam apa yang disebut ketentuan Artikel 123 tahun 1854, dimana di satu pihak ada kemandirian dalamewartakan Injil tetapi wilayah mana yang boleh dan tidak boleh diinjili ada dalam pembatasan ketentuan pemerintah kolonial. Di satu pihak, pemerintah kolonial tidak lagi campur tangan dalam urusan intern kewenangan Gereja, tetapi di lain pihak misionaris-misionaris tetap tidak memiliki kebebasan untuk pergi ke tempat-tempat mana saja. Bahkan, di banyak kesempatan para misionaris, bukan hanya dilarang untuk pergi ke Sumatra Utara dan Sumatra Barat atau Sunda atau Madura atau Bali atau Papua, misalnya, melainkan juga dilarang untuk membaptis orang Indonesia asli. Artinya, pemeliharaan rohani dijalankan hanya untuk keluarga-keluarga Belanda atau Eropa yang tersebar di kota-kota yang ada. Alasannya: untuk menghindari konflik dengan penduduk asli yang akan sangat merugikan kepentingan pemerintah kolonial. Bukan hanya itu, misi Katolik pada prinsipnya juga tidak boleh dikerjakan di tempat-tempat Zending Protestan (misi), agar tidak terjadi kemungkinan konflik antargereja.

Misi Katolik setelah “Affair Grooff” menghasilkan baptisan baru yang dalam jumlah yang bersahaja atau malahan sangat kecil. Tetapi, para imam Katolik banyak bersitegang dengan penguasa kolonial karena kebijakan-kebijakan kolonial mereka yang merugikan karya misi. Pendek kata, pada konteks ini, Gereja Katolik malahan lebih mengalami “restriksi-restriksi” (pembatasan atau larangan-larangan) yang pada gilirannya membuat para misionaris tidak leluasaewartakan Injil. Mereka hanya boleh pergi ke tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Bahkan mereka dilarang membaptis umat setempat. Tidak mengherankan dalam konteks misi ini, pertambahan jumlah umat sangat seret. Di Surabaya sendiri, setelah hampir seratus tahun usia kehadiran misionaris di sana (1808-1900), hanya terdapat laporan sepuluh orang Jawa Katolik. Dan, pada tahun 1923, saat Romo-romo CM datang melanjutkan karya misi para Romo Yesuit, laporan dari Vatikan menunjukkan terdapat jumlah umat Jawa 40. Kelak, situasinya akan berubah setelah tahun 1924.

Di Jawa Tengah, menyusul konteks “politik etik” dari pemerintah Hindia Belanda, misi Katolik mendapatkan warna yang berbeda dengan kreativitas misioner dari Romo van Lith SJ dengan Sekolah-sekolah Muntilan (1904) dan Mendut (1906). Pada tahun 1904, Romo van Lith membaptis 158 orang Jawa di Sendang Sono, Kalibawang (Muskens 2: 15). Misi Katolik “menemukan” bentuknya yang makin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat asli dengan karya pendidikan. Karya pendidikan Romo van Lith menjadi emblem karya misioner Gereja Katolik dan kelak “pendidikan Katolik” akan mewarnai perjalanan seluruh bangsa Indonesia menapaki periode kemerdekaannya. “Integrasi” spiritualitas Katolik ke dalam perjalanan pergerakan kemerdekaan



akan banyak dibangun oleh karya misi pendidikan Katolik. Misi pendidikan Katolik tidak dimaksudkan untuk mengkatolikan siapa pun melainkan untuk membangun karakter manusia yang berbudi luhur dan mencintai bangsanya. Tidak sedikit karenanya para tokoh bangsa Indonesia sejak pergerakan hingga selanjutnya berasal dari pendidikan Katolik. Pendidikan Katolik bukan hanya untuk mengejar mutu tetapi juga pada awalnya untuk melawan *iliterasi* (buta huruf) yang mendominasi bangsa ketika itu; dan pendidikan Katolik juga mendidik anak-anak kepada rasa cinta yang mendalam dengan tanah air Indonesia.

### 2.2.3 Misi Gereja Katolik Setelah Tahun 1924 dan 1925

Tahun 1924 disebut-sebut sebagai tahun untuk pertama kalinya para Vikaris Apostolik Indonesia (yang pada waktu itu terdiri dari Jakarta, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku-Irian) beserta para Prefek Apostolik bertemu untuk membicarakan keadaan Gereja. Pertemuan dimungkinkan karena telah ada pengakuan dari pemerintah kolonial bahwa mereka adalah pemimpin sah dari komunitas Katolik (1913) atau terbentuknya *Nadere Regeling* di Den Haag, dimana berkedudukan menteri urusan koloni. Pada tanggal 15 dan 16 Mei 1924, diselenggarakan di pastoran Katedral Jakarta sidang pertama yang bisa disebut sebagai Sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sidang ini diketuai oleh Mgr. A. van Velsen, SJ., Vikaris Jakarta. Hadir juga para Pemimpin Misi di Indonesia, termasuk Romo de Backere CM sebagai pimpinan misi di wilayah Surabaya.

Di antara banyak tema yang dibicarakan antara lain juga bahwa para Ordinaris **setuju penghapusan hukum artikel 123** (produk dari tahun 1854) yang menghalangi kebebasan para misionaris untuk pergiewartakan Injil kemana saja yang mereka inginkan.<sup>2</sup> Hal ini akan ditekankan lagi dalam Sidang tahun 1925 (Steenbrink 2006a, 2006b).

Langkah ini merupakan suatu kemajuan luar biasa dalam karya misi. Kelak, periode ini dan ke depan akan menjadi periode berkembangnya jumlah umat Katolik di Indonesia. Karel Steenbrink menyebut periode ini merupakan “periode subur”, dimana berlimpah baptisan baru dalam karya misi Katolik di Indonesia. Dalam sidang “para Prefek Apostolik” se-Hindia Belanda didorong pula pendirian seminari-seminari untuk pendidikan klerus pribumi. Dorongan dari sidang para “uskup” ini kelak akan menjadi awal didirikannya seminari-seminari di banyak wilayah. Di samping itu, di tahun-tahun selanjutnya para misionaris sangat giat dalam mendirikan sekolah-sekolah baik di desa maupun di kota. Upaya pendirian sekolah-sekolah tidak tanpa kesulitan, terutama dari

---

<sup>2</sup> MPM. Muskens, “Sejarah Majelis Agung Wali Gereja Indonesia”, dalam *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Jilid IIIb.*, hlm. 1435-1436.



sudut pandang finansial.<sup>3</sup> Dalam waktu relatif cepat di wilayah misi Surabaya saja didirikan sekitar seratusan sekolah baik di desa-desa maupun di kota.

Di lain pihak, konteks misi di Indonesia pada periode sesudah tahun 1924 sampai pendudukan Jepang, para misionaris – semuanya – mengeluh tentang kekurangan uang. Bantuan dari Belanda atau Eropa dari sendirinya berkurang drastis menyusul zaman Malaise, krisis ekonomi hebat dunia di awal tahun 1930an. Tak terkecuali misi di Prefekturat Surabaya. Pada masa-masa ini Prefek Apostolik, Mgr. de Backere CM, mulai menderita depresi dan kesehatannya menurun drastis.

Salah satu terobosan yang penting juga ialah dalam bidang pewartaan. Para Vikaris dan Prefek Apostolik sepakat untuk mendirikan dan mengokohkan pers Katolik. Di tingkat-tingkat Prefekturat mulai didirikan atau dipikirkan secara serius untuk memulai suatu penerbitan Katolik dalam bahasa Belanda dan bahasa setempat. Kelak di Surabaya, saat Pendirian Prefekturat Apostolik tahun 1928, berdirilah suatu penerbitan yang disebut *Katholieke Gids*, dimana para penulis-penulis Katolik banyak melakukan diskusi dan perdebatan melawan opini-opini anti Gereja (Boonekamp 1974).

Tidak hanya itu, disepakati pula agar para misionaris Katolik mempelajari bahasa dan kebudayaan setempat. Di sini muncul kesadaran awali bagaimana suatu karya misi harus pula mencakup upaya-upaya untuk “mengakarkan” iman dalam kebudayaan setempat. Dalam konteks misi di Prefekturat Surabaya, pemimpin misi, Mgr. de Backere CM sangat mendorong para misionarisnya untuk belajar bahasa Jawa. Dan, pada saat yang sama CM mengupayakan pula pelayanan pastoral bagi umat yang berbahasa Mandarin dan Belanda juga (Haest 1934).

Bukan hanya belajar bahasa Jawa, misionaris-misionaris CM di Prefekturat Surabaya juga mendirikan banyak sekolah-sekolah desa. Sejarah pendirian banyak sekolah desa menampilkan bagaimana para misionaris bekerjasama dengan masyarakat setempat, mulai dari kalangan pemilik perkebunan hingga masyarakat setempat. Beberapa diantaranya malahan dibantu oleh kepala desa atau bahkan pemimpin umat beragama setempat untuk mendirikan dan menjalankan sekolah-sekolah rakyat tersebut. Para misionaris bukan hanya tidak mengambil jarak dari “kebudayaan” Jawa melainkan juga mengakrabinya, mempelajarinya, dan kelak mereka juga melakukan “inkulturasi” dalam pewartaan iman Katolik. Kelak, dalam konteks inilah, Romo Jan Wolters mendirikan Gereja Katolik Pohsarang, yang saat ini menjadi tempat ziarah bagi berbagai kelompok umat, bukan hanya Katolik tetapi juga umat beragama lain. Pada masa-masa ini konteks misi Katolik makin terlihat mengalami proses “inkulturisasi” dalam kebudayaan setempat. Misi Katolik makin “jawa” (dan bukan lagi “eropa”). Di era ini misi Katolik berada di musim menuai.

---

<sup>3</sup> Salah satu kesulitan yang nyata ialah zaman Malaise ekonomi dunia di tahun 1930-an.



Waktu “menuai” di periode konteks sesudah tahun 1924/1925 ini akan terhenti secara menegangkan selama beberapa tahun saat pendudukan Jepang. Pada masa Jepang datang, situasi misi di Indonesia mengalami “paceklik” berat dan secara nyata itu dialami oleh banyak keuskupan untuk jangka waktu yang cukup lama sesudahnya.

## **2.2.4 Misi Katolik pada masa dan sesudah Perang Dunia II**

Tentang konteks misi Katolik di periode pendudukan Jepang, halnya telah banyak ditulis dalam berbagai buku dan terbitan. Dan, dalam buku ini, juga beberapa episode para misionaris dibawa ke Interniran Jepang diuraikan. Pendek kata, periode Perang Dunia II misi Katolik tidak mati atau bahkan tidak redup, sebab para imam pribumi dengan bantuan tokoh-tokoh awam yang handal dengan penuh semangat menghidupkan api iman Katolik. Meski tentu saja, karena jumlah yang sangat kecil, terjadi kesulitan yang luar biasa di daerah-daerah atau stasi-stasi kecil. Dalam konteks sejarah Gereja Katolik di Vikariat Surabaya, tanah-tanah misi yang telah dibeli dan dibangun kapel atau gereja dirusak, dihancurkan, atau kemudian juga “diambil” oleh kelompok masa dan sampai beberapa tahun kemudian baru bisa dipulihkan. Atau, dalam banyak kasus di stasi-stasi Blitar Selatan, banyak tanah misi dan Gereja terbengkelai dan akhirnya digunakan oleh penduduk setempat atau dipakai sebagai tempat sekolah publik, sementara kapel-kapelnya dihancurkan.

Periode ini pendek kata – dalam konteks misi di Vikariat Surabaya (karena Surabaya menjadi salah satu episenter Perang Dunia II) – kerusakan yang diderita oleh misi Katolik sungguh besar. Para misionarisnya sendiri hampir semuanya mengalami kelelahan dan kemunduran dari sisi kesehatan fisik. Misi Katolik di periode setelah PD II memiliki karakter “restoratif”. Tidak semua wilayah stasi yang sebelum perang telah menerima Injil bisa dipulihkan.

Tetapi di tahun 1951 Sekretaris Nuntius pada waktu itu, Romo van der Borgh CM, menulis bahwa orang-orang Katolik di Indonesia telah mencapai angka 1 juta (dari sekitar 70 an juta Penduduk Indonesia). Dari sendinya angka itu cukup signifikan setelah misi Katolik melewati lorong-lorong gelap dalam sejarahnya sejak tahun 1800.

Ada yang perlu diingat pula, bahwa Gereja Katolik menjadi “makin Indonesia”, untuk menyebut bahwa orang-orang Katolik Eropa atau Belanda makin sedikit jumlahnya (karena mereka pergi pulang ke Belanda atau beremigrasi ke Eropa atau tempat lain karena situasi ketegangan politik di tingkat bawah). Secara statistik jumlah umat Katolik orang-orang Indonesia makin menjulang tinggi seiring dengan merosotnya umat Belanda/Eropa.

Pelayanan para misionaris dalam “bahasa” (seperti bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jawa) semakin meredup seiring dengan perkembangan Bahasa Indonesia. Sampai dengan menjelang tahun 1960-an, Vikaris Apostolik Surabaya, Mgr. J. Klooster CM, masih menulis Surat Gembala dalam dua



bahasa (Indonesia dan Belanda). Sungguhpun pelayanan kepada umat Katolik menurut bahasanya sudah tidak ada lagi, para pimpinan Gereja sangat mendesak umat Katolik untuk mendalami kebudayaan Indonesia. Di sinilah konteks “kerasulan intelektual” dan “kerasulan politik” kaum awam makin menemukan periode suburnya, setelah benih-benihnya dimulai para tokoh awam dan misionaris sebelum PD II dan pada masa pendudukan Jepang (Wolters 1946; Bekkering, Huisarts, and Bekkering-Merens 1980; Bonga 1996; Kowner 2010; Siong 1998; Archer 2004; Kheng 1979; Horton 2012; Krancher 1996; Emery 2010).

***Pendirian-pendirian seminari.*** Syukur kepada kreativitas para misionaris Belanda, Gereja Katolik Indonesia memiliki keterlibatan dan komitmen tinggi pada pendidikan klerus indigeneous. Pendidikan klerus kiranya sudah dirasakan sejak Ensiklik *Maximum Illud*, namun secara lebih menyebar sejak Perang Dunia II. Dan, pada akhirnya setelah Konsili Vatikan II (1962-1965), di Indonesia makin didirikan pusat-pusat pendidikan para calon imam yang hingga kini, terdapat more than institusi pendidikan calon imam (*Major Seminaries*).

1. Theological Department of Sanata Dharma University, Yogyakarta, yang dimulai oleh Keuskupan Agung Semarang, Society of Jesus (S.J.), and Missionary of the Sacred Family (M.S.F.).
2. Philosophical Department of Catholic University of Parahyangan, Bandung, which has been initiated the diocese and the Ordo of Holy Crosier (O.S.C.).
3. Philosophical Department of Catholic University of St. Thomas, Pematang Siantar, Medan, in which the Dioceses of Sumatra and Capuchins send their students.
4. Philosophical Department of Catholic University of Widya Mandala, Surabaya.
5. Philosophical Department of Catholic University of Widya Mandira, Kupang.
6. Institute of Philosophy and Creative Technology, Ledalero, Flores, which was started by S.V.D.
7. School of Philosophy Theology, Fajar Timur, Papua.
8. School of Philosophy and Major Seminary, Pineleng, Manado, which was initiated by M.S.C. and the Diocese of Manado.
9. School of Philosophy Theology, Widya Sasana, Malang, which was initially fruit of collaboration of the Vincentians and Carmelites (O.Carm) in 1971.



10. School of Philosophy Theology, Drijarkara, Jakarta, which was started by the Jesuits, the Archdiocese of Jakarta, and Franciscans.
11. Major Seminary of *Pastor Bonus*, Pontianak which was created by the Bishops of Kalimantan.
12. School of Catholic Religion, Bandol, West Kalimantan, which was initiated by the CSE.

And, pendirian seminari tinggi ini makin diperkokoh dengan pendirian sekolah-sekolah tinggi pastoral dan katekese yang tersebar di seluruh Indonesia bagi tenaga pengajar agama Katolik. Pendirian institusi-institusi Katolik ini menegaskan komitmen tinggi dari Gereja Indonesia untuk menanggapi perkembangan hukum-hukum di Indonesia. Pendirian institusi ini menandai “kemajuan” Gereja Katolik Indonesia yang punya tradisi kerja sama dan keterlibatan pada negara. Segala apa yang diproduksi oleh institusi-institusi Katolik diakui oleh negara sedemikian rupa sehingga para alumni dapat bekerja di dalam pemerintahan Indonesia (Mujijah ALMA 1997; Rosmawati Rumahorbo 2018; van den Borgh 1954).

### **2.2.5. Misi Katolik Setelah Tahun 1961**

Tahun 1961 adalah tahun dimana Gereja Katolik di Indonesia secara definitif menjadi “Gereja Indonesia”. Artinya, berkat deklarasi *Quod Christus Adorandus* dari Bapa Suci Yohanes XXIII, wilayah-wilayah gerejani di Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Keuskupan. Inilah yang disebut momen “pendirian hirarki” Gereja Katolik di Indonesia. Apa konsekuensi dari *Quod Christus*?

Bapak Uskup memiliki segala kewenangan untuk menata dan mengelola wilayahnya secara lebih otonom dan luas. Mulai dibenahi relasi-relasi keuskupan dengan kongregasi atau tarekat religius yang telah berkarya atau yang mendirikan keuskupannya. Dari sendirinya konsekuensi yang lain ialah makin berkembangnya keuskupan dengan partisipasi umat awamnya.

Di lain pihak setelah tahun Pendirian Hierarki di Indonesia, Gereja Katolik berbenah dalam pembaruan Konsili Vatikan II. Gereja makin baru dan makin terus memperbarui diri seiring dengan semangat Konsili Vatikan II. Misi di dalam Gereja Katolik juga dijalankan selaras dengan semangat itu.

Gereja Keuskupan Surabaya menyambut bala bantuan misionaris Romo-Romo Italia dari Provinsi CM Roma yang berkarya di bagian barat Keuskupan dari pantai selatan, Pacitan, hingga pantai utara. dan problem politik, sosial, ekonomi. Kehadiran mereka menjadi “angin segar” bagi Keuskupan, bukan hanya karena mendapat tambahan pekerja-pekerja di kebun anggur, melainkan kehadiran mereka akan mewarnai kharisma Gereja Katolik Keuskupan Surabaya di masa depan, terutama dengan karya nyata bagi orang-orang miskin



dan terlantar, seperti rehabilitasi kusta Wireskat, Rembang, dan beberapa pendirian karya sosial yang lain.

***Contitutio Apostolica: "Quod Christus Adorandus" (1961)***

Dokumen ini salah satu dokumen penting dalam sejarah Katolik di Indonesia pada umumnya dan Keuskupan Surabaya khususnya. Sejak tahun 1961, Vikariat-Vikariat ditetapkan sebagai “dioses” (Keuskupan). Berikut ini terjemahannya:

Apa yang diperintahkan Kristus, Putera Allah yang patut disembah, kepada para Rasul yakni menjelajah seluruh dunia danewartakan Injil kepada para Rasul yakni menjelajah seluruh dunia danewartakan Injil kepada rakyat dan bangsa-bangsa, dan dengan gembira memaklumkan bahwa semua orang yang dibebaskan dari dosa, dapat bergabung dalam satu kawanan keselamatan, sudah senantias terlaksana dalam Gereja. Tak terbilang jumlah bangsa-bangsa yang dibaharui oleh iman kristiani dan demikian luas tersebar agama kristiani, sehingga Nama Kristus terkudus dimuliakan dengan pujian tertinggi sampai ke ujung bumi, dan di mana-mana kepada-Nya dipersembahkan kurban murni dan tak bercela (Bdk. Mal 1:11).

Mengingat apa yang dewasa ini berkat kemurahan istimewa Allah terjadi di Indonesia, menurut pandangan Bapak Kardinal yang memimpin Kongregasi Penyebaran Iman sudah tiba saatnya untuk mendirikan Hirarki episkopal. Maka dari itu, setelah mempertimbangkannya dengan baik, dan setelah mendengarkan Caietano Alibrandi, Internunsius Apostolik di Indonesia, dengan otoritas apostolik kami memutuskan dan memerintahkan hal-hal sebagai berikut:

Semua Gereja Republik Indonesia dengan surat bermeterai ini kami angkat ke tingkat Keuskupan-keuskupan, dan membentuk enam Provinsi Gerejawi, yakni:

Provinsi Jakarta yang menjadi Gereja metropolit Jakarta, hingga kini berstatus sebagai Vikariat Apostolik, dan katedralnya Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga; Keuskupan-keuskupan Sufragannya ialah: Bandung, hingga kini Vikariat Apostolik yang katedralnya ialah Gereja Santo Petrus Rasul; Bogor, hingga kini Vikariat Apostolik Sukabumi, yang katedralnya ialah Gereja Santa Perawan Maria;

Provinsi Semarang yang meliputi Takhta metropolit Semarang, hingga kini Vikariat Apostolik yang katedralnya ialah Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosari; dan Keuskupan-keuskupan Sufragannya ialah: Purwokerto, hingga kini Vikariat Apostolik yang katedralnya ialah Gereja Kristus Raja; Surabaya, hingga kini Vikariat Apostolik, yang katedralnya ialah Gereja Hati Kudus Yesus; Malang, hingga kini Vikariat Apostolik, yang katedralnya ialah Maria Bunda Karmel.



Provinsi Ende yang terdiri dari: Gereja Ende, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya ialah Kristus Raja; dan Keuskupan-keuskupan sebagai berikut: Larantuka, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya ialah Santa Perawan Maria Ratu Rosario; Ruteng, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya ialah Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga dan Santo Yusuf; Denpasar, hingga kini Prefektur Apostolik yang gereja utamanya ialah Santo Yusuf; Atambua, hingga kini Vikariat Apostolik, yang gereja utamanya ialah Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Cela.

Provinsi Medan, yang menjadi Tahta metropolit Medan, hingga kini Vikariat Apostolik, yang gereja utamanya ialah Santa Perawan Maria Tak Bernoda; dan Keuskupan-keuskupan sebagai berikut: Palembang, hingga kini Vikariat Apostolik, yang katedralnya juga bernama Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Cela; Pangkal Pinang, hingga kini Vikariat Apostolik, yang katedralnya ialah Santo Yusuf; Tanjung Karang, dahulu Prefektur apostolik yang katedralnya bernama Kristus Raja; Padang, dahulu Prefektur Apostolik, yang katedralnya bernama Santa Teresia kanak-kanak Yesus.

Provinsi Pontianak, terdiri dari Keuskupan-keuskupan sebagai berikut: Pontianak sebagai metropolit, hingga kini Vikariat Apostolik, yang gereja utamanya disebut Santo Yusuf dan Keuskupan-keuskupan Sufragan: Banjarmasin, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya dipersembahkan kepada Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yusuf; Samarinda, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria Pertolongan Abadi; Ketapang, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya dipersembahkan kepada Santa Gemma Galgani; Sintang, hingga kini Vikariat Apostolik yang gereja utamanya dipersembahkan kepada Kristus Raja.

Provinsi Makassar yang terdiri dari Gereja-gereja sebagai berikut: Makassar sendiri, hingga kini Vikariat Apostolik, yang mendapat status sebagai metropolit; Manado dan Amboina sebagai Keuskupan-keuskupan Sufragan, hingga kini Vikariat Apostolik, katedral Makassar dipersembahkan kepada Hati Kudus Yesus, sedangkan gereja-gereja lainnya Santa Perawan Maria Tanpa Cela.

Selain itu kami menetapkan agar wilayah-wilayah itu tetap berada dalam lingkungan Kongregasi Suci Penyebaran Iman. Dan Kepala-kepala Gereja-gereja masing-masing yang semuanya patut meneruskannya berstatus sebagai Uskup-uskup residensial, sehingga di Provinsi Jakarta saudara terhormat Adrianus Djajasepoetra beralih dari Gereja Trisipa ke Takhta metropolit Jakarta; saudara terhormat Petrus Marinus Arntz dari Gereja Stectorena ke Takhta katedral Bandung; Di Provinsi Semarang saudara terhormat Albertus Soegijapranata dari Gereja Danabena ke Takhta metropolit Semarang; saudara Wilhelmus Schoemaker dari Gereja Balbura ke Takhta katedral Purwokerto;



saudara Johannes Klooster dari Gereja Germanicopolitana ke Takhta katedral Surabaya; saudara terhormat Antonius E.I. Albers dari Gereja Tobna di Numidia Takhta katedral Malang; Di Provinsi Ende saudara terhormat Gabriel Manek dari Gereja Alinda ke Takhta metropolit Ende; saudara terhormat Antonius Hubertus Thijsen dari Gereja Nilopolitana ke Takhta katedral Larantuka; saudara terhormat Wilhelmus van Bekkum dari Gereja Tigense ke Takhta katedral Ruteng; saudara terhormat Theodorus van den Tillaart dari Gereja Muliensi ke Takhta katedral Atambua; Di Provinsi Medan saudara terhormat Antonius Henricus van den Hurk dari Gereja Phelbesiana ke Takhta metropolit Medan; saudara terhormat Henricus Martinus Mekkelholt dari Gereja Athyrensi ke Takhta katedral Palembang; saudara terhormat Nicolaus van der Westen dari Gereja Bladiense ke Takhta katedral Pangkal Pinang; Di Provinsi Pontianak saudara terhormat Herculanus J.M. van der Burgt dari Gereja Abilena di Palestina ke Takhta metropolit Pontianak; saudara terhormat Wilhelmus Demarteau dari Gereja Arsinoensi di Cyprus ke Takhta katedral Banjarmasin; saudara terhormat Jacobus Henricus Romijn dari Gereja Zenopolitan di Isauria ke Takhta katedral Samarinda; Di Provinsi Makassar saudara terhormat Nicolaus Schneiders dari Gereja Coensi ke Takhta metropolit Makassar; saudara terhormat Nicolaus Verhoeven dari Gereja Hermonthiana ke Takhta katedral Manado; saudara terhormat Jacobus Grent dari Gereja Parlaitana ke Takhta katedral Amboina;

Takhta Bogor, Denpasar, Tanjungkarang, Padang, Ketapang, dan Sintang yang pada saat ini lowong, akan segera kami selesaikan lewat surat apostolik.

Hendaknya para Uskup mengusahakan agar mereka dengan sebaik-baiknya membina kaum muda yang dipanggil ke imam; mereka ini kekayaan dan khazanah sejati Keuskupan. Selain itu hendaknya dibentuk Dewan kanonik menurut norma-norma yang kami berikan; untuk sementara hendaknya dipilih penasihat-penasihat diosesan untuk mendampingi Uskup dengan nasihat dan bantuan. Dalam kepemimpinan Keuskupan, serta pengelolaannya dan sebagainya, hendaknya ditepati apa yang ditetapkan Kitab Hukum Kanonik.

Putra kami terkasih Caietano Alibrandi akan mengusahakan pelaksanaan surat kami ini, atau siapa yang diberinya delegasi dengan kewenangan yang perlu untuk itu. Setelah itu hendaknya ia menyusun dokumen yang turunannya hendaknya segera dikirim kepada Kongregasi Penyebaran Iman. Apabila pada waktu itu orang lain mengepalai Internunsiatur, hendaknya ia menyelesaikan perintah kami ini.

Kami ingin agar surat ini juga berlaku di masa depan; agar apa yang telah diputuskan lewatnya ditaati dalam semangat religius oleh mereka yang berwenang, dan dengan demikian tetap berlaku. Surat ini tak dapat dihambat oleh ketentuan apa pun yang bertentangan dengannya, karena dengan surat ini kami membatalkan semua ketentuan itu. Maka daari itu bila seseorang dengan otoritas apa pun, dengan tahu atau tidak tahu bertindak melawan apa



yang telah kami tetapkan, maka kami perintahkan agar itu dianggap tidak berlaku. Selain itu tak seorang pun boleh mencabut atau merusak dokumen kehendak kami; dengan turunan surat ini, baik yang diketik maupun dibuat dengan tangan yang dibubuhi meterai orang yang menduduki jabatan gerejawi dan ditandatangani oleh panitera publik, harus dianggap mempunyai daya kekuatan seperti surat ini, bila ditunjukkan.

Barangsiapa meremehkan atau dengan cara apa pun menolak keputusan kami seluruhnya, hendaknya tahu bahwa ia akan dikenai hukuman yang ditetapkan hukum bagi mereka yang tak melaksanakan perintah Paus.

Diberikan di Roma, Takhta Santo Petrus, tiga Januari 1961, tahun ketiga pontifikat kami.

DOMINICUS Kard.  
P.Kard.  
TARDINI  
Urusan Publik Gereja

GREGORIUS,  
  
AGAGIANIAN  
Prefek Kongregasi  
Penyebaran Iman

Franciscus Tinello  
Kepala Cancellaria Apostolica

Franciscus H. Ferretti, Proton. Apost.  
Albertus Serafini, Proton. Apost.

Meterai \_\_\_\_\_

## **PENGAKUAN SUSUNAN HIRARKI GEREJA KATOLIK INDONESIA OLEH NEGARA/PEMERINTAH:**

*Berturut-turut dikeluarkan Keputusan Menteri Agama yang menyesuaikan keputusan sebelumnya tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia:*

*No. 89, 13 Desember 1965: perubahan Prefektur Apostolik dan Vikariat Apostolik menjadi Keuskupan (Agung)*

*No. 162, 1 Agustus 1970: mencabut Kep. No. 89, 13 Desember 1965*

*No. 37, 2 Mei 1981: meninjau kembali Kep. No. 162/1970*

*F.X. Armada Riyanto, Konteks Misi Katolik di Indonesia*



No. 58, 10 Juli 1984: *meninjau kembali Kep. No. 37/1981*

No. 276, 12 November 1991: *meninjau kembali Kep. No. 37/1981 dan Kep. No. 58/1984*

No. 541, 22 Desember 1994: *meninjau kembali Kep. No. 276/1991*

## REFERENSI

- Alberts, Tara. 2012. "Catholic Communities and Their Festivities under the Portuguese Padroado in Early Modern Southeast Asia." In *Portuguese and Luso-Asian Legacies in Southeast Asia, 1511 - 2011, Volume 2: Culture and Identity in the Luso-Asian World: Tenacities & Plasticities*, edited by Laura Jarnagin, II:21–43. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Archer, Bernice. 2004. *The Internment of Western Civilians under the Japanese 1941-1945: A Patchwork of Internment*. London: Routledge Curzon.
- Bekkering, P.G., Huisarts, and M Bekkering-Merens. 1980. "De Japanse Kampen; Nog Geen Verleden Tijd [The Japanese Internment Camps – Not a Thing of the Past]." *Ned. T. Geneesk* 124 (13): 467–73.
- Bonga, Dieuwke Wendelaar. 1996. *Eight Prison Camps: A Dutch Family in Japanese Java*. Intern. Studies. Ohio: Ohio University.
- Boonekamp, Piet. 1974. "Sejarah Keuskupan Surabaya [History of the Diocese of Surabaya]." In *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, edited by MPM Muskens, 3b:949–99. Jakarta : Kantor Wali Gereja Indonesia .
- Borgh, A. van den. 1954. "De Katholieke Kerk in de Indonesische Archipelago (The Catholic Church in the Indonesian Archipelago)." *Missiefront* 40 (1): 1–8.
- Camps, Arnulf. 2000. "THE CATHOLIC MISSIONARY MOVEMENT FROM 1492 TO 1789." In *Studies in Asian Mission History, 1956-1998*, edited by Arnulfs Camps, 13–30. BRILL. doi:10.1163/9789047400318\_003.
- Emery, Lindsay. 2010. "Filling the Emptiness of a Stunned Inner Silence: Survivors' Memoirs of Japanese Internment Camps in Indonesia during World War II (A Thesis Submitted to the Department of Language for BA, Duke University)." Thesis of BA, Durham: Duke University.
- Faber, G.H. von. 1931. "Hoofdstuk Vier: Het Roomsche-Katholicisme." In *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden Tot de Instelling van Den Gemeenteraad (1906) Met Vele Platen En Kaarten*, 300–308. Soerabaia: Uitgegeven door de Gemeente Soerabaia ter Gelegenheid van haar zilveren jubileum .
- Haest, Jan. 1934. "De Missie van Soerabaia." *De Katholieke Gids. Weekblad Voor de Prefectuur Soerabaia*, June 24.



- Hensen, A.H.L. 1908. "Het Onstaan van de Rooms-Katholieke Missie in Nederlands-Indië." *De Katholiek* 133: 274–95.
- Horton, William Bradley. 2012. "The Political Work of Abdoe'lxarim M. s. in Colonial and Japanese Occupied Indonesia 1930s – 1940s ." *Waseda Studies in Social Sciences* 12 (3).
- Kheng, Cheah Boon. 1979. "The Japanese Occupation of Malaya, 1941–45: Ibrahim Yaacob and the Struggle for Indonesia Raya." *Indonesia* 28 (October): 84. doi:10.2307/3350897.
- Kleintjes, J.J. 1931. "Mgr. Grooff, Apostolisch Vicaris van Batavia." *Bijdragen Bisdom Haarlem* 47: 399.
- Kowner, Rotem. 2010. "The Japanese Internment of Jews in Wartime Indonesia and Its Causes." *Indonesia and the Malay World* 38 (112): 349–71. doi:10.1080/13639811.2010.513846.
- Krancher, Jan A. 1996. *The Defining Years of the Dutch East Indies, 1942–1949: Survivors' Accounts of Japanese Invasion and Enslavement of Europeans and the Revolution That Created Free Indonesia*. Jefferson, North Carolina: McFarland and Company, Inc., Publishers.
- Mujijah ALMA, Ignatia. 1997. *Album Kenangan 50 Tahun Imamat Romo Paul Janssen CM 13 Juli 1947–13 Juli 1977*. Malang: ALMA.
- Muskens, H (editor). 1974. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Vol. 3b: Wilayah-Wilayah Keuskupan Dan Majelis Agung Waligereja Indonesia Abad Ke-20 Jawa Nusa Tenggara*. Edited by H. Muskens. Vol. 3b. Ende Flores: Percetakan Arnoldus.
- Prabhu, Wilfred Prakash D'Souza. 2005. "PADROADO VERSUS PROPAGANDA FIDE': THE JURISDICTIONAL CONFLICT BETWEEN PORTUGAL AND ROME: STATE – CHURCH RELATIONS IN SIXTEENTH-SEVENTEENTH – EIGHTEENTH CENTURY INDO-PORTUGUESE HISTORY, ITS REPERCUSSION ON KONKANI ROMAN CATHOLICS OF COASTAL KARNATAKA." In *Proceedings of the Indian History Congress*, 974–98. Bangalore: Indian History Congress.
- Rosmawati Rumahorbo, Lidwina. 2018. *Saya Pendosa: Mengenang Satu Tahun Wafat Romo Janssen, CM (20 April 2017–20 April 2018)*. Malang: Komisi Spiritualitas ALMA PUTRI.
- Siong, Han Bing. 1998. "The Japanese Occupation of Indonesia and the Administration of Justice Today: Myths and Realities ." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 154 (3): 416–56.
- Souza, Teotónio R. de. 2005. "Indo-Portuguese History: Global Trends." In *Proceedings of XI-Seminar on Indo-Portuguese History, Goa, 21–23 Sept. 2003*, 31–57. Goa: The Socio-Cultural Perspective in ISIPH Seminars: Assessing 25 Years of Performance.



- Steenbrink, Karel. 2006a. *Orang-Orang Katolik Di Indonesia 1808-1942 Jilid 1: Suatu Pemulihan Bersahaja 1808-1903*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- . 2006b. *Orang-Orang Katolik Di Indonesia 1808-1942: Pertumbuhan Yang Spektakuler Dari Minoritas Yang Percaya Diri 1903-1942. Jilid 2. (Transl. from Catholics in Indonesia 1808-1942: A Documentary History Volume 2, the Spectacular Growth of a Self-Confident Minority 1903-1942)*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Velden, van der. 1908. *De Rooms-Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908*,. Malmberg.
- Visser, B.J.J. 1925. *Onder Portugees-Spaanse Vlag. De Katholieke Missie van Indonesië 1511-1601*. Amsterdam.
- Vriens SJ, G. 1972. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Vol. 2: Wilayah Tunggal Prefektur-Vikariat Abad Ke 19 - Awal Abad Ke 20*. Vol. 2. Ende Flores: Percetakan Arnoldus.
- Winsen, Gerard van. 1970. *Rooms-Katholieke Missie in Indonesië*. Amsterdam-Brussels: Grote Winkler Prins.
- Wolters, Jan. 1946. “De Lazaristen Missie Tijdens de Japanse Bezetting (The Lazarist Mission during the Japanese Occupation).” *Missiefront* 32 (4): 1–7.